

JURNAL TARBIYAH

INTEGRASI NILAI-NILAI AGAMA DAN KARAKTER DALAM KURIKULUM
PENDIDIKAN GURU MENGACU KKNi DAN SNPT

BAHASA SEBAGAI CERMIN KEBUDAYAAN

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PERKANTORAN MODERN DI SEKOLAH
MAS AMALIYAH SUNGGAL

PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA SEKOLAH DAN
PROFESIONALISME GURU TERHADAP IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS
SEKOLAH PADA PESANTREN DI KABUPATEN AGAM

EFEKTIFITAS MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN UNTUK
MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU BAHASA INGGRIS DI KOTA BINJAI

PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR MAHASISWA MELALUI PENERAPAN GROUP
INVESTIGATION BERBANTU MEDIA MICROBLOGGING EDMODO

PROSES BERPIKIR MAHASISWA PMTK IAIN BUKITTINGGI DALAM
MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIKA

PEMIKIRAN SOSIAL DAN KEISLAMAN NURCHOLISH MADJID (CAK NUR)

PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DAN KECERDASAN
EMOSIONAL SISWA MTs NEGERI 2 MEDAN MELALUI PENDEKATAN
MATEMATIKA REALISTIK

TOKOH-TOKOH PEMBAHARU PENDIDIKAN ISLAM DI MESIR

JURNAL TARBIYAH

Terbit dua kali dalam setahun, edisi Januari - Juni dan Juli - Desember. Berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu-ilmu ketarbiyahan, kependidikan dan keislaman baik berupa telaah, konseptual, hasil penelitian, telaah buku dan biografi tokoh

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

Ketua Penyunting

Mesiono

Penyunting Pelaksana

Junaidi Arsyad
Sakholid Nasution
Eka Susanti
Sholihatul Hamidah Daulay

Penyunting Ahli

Firman (Universitas Negeri Padang, Padang)
Naf'an Tarihoran (Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten)
Jamal (Universitas Negeri Bengkulu, Bengkulu)
Hasan Asari (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan)
Fachruddin Azmi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan)
Ibnu Hajar (Universitas Negeri Medan, Medan)
Khairil Ansyari (Universitas Negeri Medan, Medan)
Saiful Anwar (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung)

Desain Grafis

Suendri

Sekretariat

Maryati Salmiah
Reflina
Nurlaili
Ahmad Syukri Sitorus

INTEGRASI NILAI-NILAI AGAMA DAN KARAKTER DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN GURU MENGACU KKNi DAN SNPT

Siti Halimah

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan

Email: sisithalimah@uinsu.ac.id

Abstrak: Integrasi nilai-nilai agama dan karakter dalam kurikulum pendidikan guru bertujuan membentuk pribadi mahasiswa calon guru menjadi manusia yang religius, berilmu, warga masyarakat dan warga negara yang baik. Sedangkan pengembangan kurikulum LPTK mengacu KKNi dan SNPT bertujuan untuk menyiapkan sosok lulusan pendidikan guru dengan merujuk kepada standar nasional yang disesuaikan dengan karakteristik pendidikan tinggi yaitu berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sistem pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan guru dengan menggunakan dua komponen pokok, yaitu: (i) komponen kurikulum untuk memberikan bekal kompetensi kependidikan dan (ii) komponen kurikulum untuk memberikan bekal kompetensi substansi materi yang akan diajarkan. Ada dua model atau pola integrasi KKNi dan SNPT dalam kurikulum LPTK, yaitu: (1) pola yang terintegrasi antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi, artinya level 6 dan 7 dilaksanakan secara bersamaan, atau (2) pola yang berlapis, yaitu pendidikan akademik terlebih dahulu baru dilanjutkan pendidikan profesi, artinya level 6 terlebih dahulu, baru dilanjutkan pada level 7.

Kata Kunci: Urgensi, Integrasi, kurikulum, KKNi, Transdisiplin

Abstract: *The integration of religious values and character in the teacher education curriculum aims to shape the individual student teacher into a religious, knowledgeable, citizen and a good citizen. While the development of LPTK curriculum referring to KKNi and SNPT aims to prepare the figure of teacher education graduates by referring to national standards that are tailored to the characteristics of higher education that is obliged to hold University Tri Dharma include education, research, and community service. Curriculum development system in teacher education institute by using two main components, namely: (i) curriculum component to provide educational competency and (ii) curriculum component to provide the competence of material substance to be taught. There are two models or patterns of integration of KKNi and SNPT in LPTK curriculum, namely: (1) integrated pattern between academic education and professional education, meaning that level 6 and 7 are implemented simultaneously, or (2) layered pattern, that is academic education first newly continued professional education, meaning level 6 first, then proceed at level 7.*

Keywords: *Urgency, Integration, Curriculum, KKNi, Trans discipliner*

Pendahuluan

Percepatan arus informasi, globalisasi, dan krisis multidimensional telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan, termasuk semakin terkikisnya nilai-nilai dan moral pada sebagian masyarakat. Oleh itu pendidikan karakter dan keagamaan dalam kehidupan manusia penting dilakukan. Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia sehingga mendorong untuk diperbincangkan banyak kalangan dari berbagai sudut pandang. Allan C. Ornstein dan Daniel U. Levina (1985: 76) mengatakan mengingat pentingnya pendidikan bagi manusia telah mendorong munculnya berbagai teori tentang pendidikan. Dari teori-teori tersebut muncul berbagai rumusan tujuan pendidikan, antara lain teori perenialisme menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mendidik pribadi yang rasional. Sedangkan teori pendidikan esensialisme menyatakan tujuan pendidikan adalah mendidik pribadi yang berguna dan kompeten. Sementara teori progresivisme menyatakan pendidikan itu bertujuan untuk mendidik individu menurut minat dan kebutuhannya. Teori rekonstruktivisme menyatakan pendidikan bertujuan untuk mengkonstruksi masyarakat.

Pernyataan tujuan pendidikan menurut teori di atas menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sarana menyempurnakan perkembangan potensi-potensi manusia. Scotter, dkk (1985: 106), menyatakan: "*education involves both the demands of socialization, of societal membership of community and the drives individuality, for personal growth, for self-actualization and self realization*". Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan pribadi. Oleh sebab itu memperoleh pendidikan merupakan hak asasi bagi setiap orang.

Hak-hak mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara telah diakui di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Kesamaan hak mendapatkan pendidikanpun telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa salah satu dari tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk mencerdaskan bangsa. Pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Untuk merealisasikan amanat pembukaan dan pasal 31 ayat dari UUD 1945 Pemerintah berupaya menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 3 menyatakan secara jelas bahwa, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dan bertujuan mengembangkan potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada bagian lain, dijelaskan pula bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik berlangsung sepanjang hayat (pasal 3 ayat 5). Kata berakhlak mulia pada tujuan pendidikan nasional menunjukkan bahwa salah satu dari tujuan pendidikan di Indonesia adalah menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan moral keagamaan pada peserta didik. Aspek moral menjadi aspek yang penting dalam pendidikan.

Dalam konteks pendidikan Islam menurut Hujair AH, Sanaky (2003: xi) pendidikan perlu membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dilandasi dengan nilai-nilai ilahiyah, kemanusiaan (insaniyah), masyarakat, lingkungan dan berbudaya. Dari kerangka pemikiran ini, maka pendidikan Islam harus mengembangkan pendidikan yang integralistik, humanistik, pragmatis, dan berakar pada budaya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konsep pendidikan yang integralistik, secara utuh berorientasi pada nilai-nilai Ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan dan alam yang pada umumnya sebagai suatu yang integralistik bagi perwujudan kehidupan rahmatan lil alamin. Dalam konsep pendidikan humanistik, pendidikan yang berorientasi dan memandang manusia sebagai manusia (humanisasi), dengan menghargai hak-hak asasi manusia, hak untuk menyuarakan pendapat, mengembangkan potensi berpikir, berkemauan, dan bertindak sesuai nilai-nilai luhur kemanusiaan. Konsep pendidikan pragmatis, memandang manusia sebagai makhluk fungsional perlu melangsungkan, mempertahankan, mengembangkan kehidupannya baik secara jasmani maupun rohani serta mewujudkan manusia yang sadar akan kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Konsep pendidikan berakar pada budaya, dapat mewujudkan manusia yang memahami eksistensinya dengan memiliki kepribadian yang unggul, harga diri, percaya pada kemampuan sendiri, membangun budaya berdasarkan budaya sendiri yang didasarkan pada nilai-nilai ilahiyah. Atas dasar itu, maka kompetensi yang dikembangkan dalam proses pendidikan Islam harus berbasis kepada kompetensi nilai-nilai ilahiyah, *knowledge, skill, ability*, sosial kultural dan operasional dapat terintegrasi dengan masyarakatnya, lingkungannya, dan selalu menerima dan ikut serta melakukan perubahan.

Namun berbagai kenyataan pahit menunjukkan kompetensi peserta didik pada aspek moral masih sangat memprihatinkan. Ini terjadi pada semua tingkatan pendidikan persekolahan termasuk di perguruan tinggi. Fenomena krisis moral ini muncul

disebabkan berbagai faktor, diantaranya Komaruddin Hidayat dalam *Kompas tanggal 28 Juni 2006*, memaparkan bahwa, proses pendidikan di Indonesia terkesan bahwa sekolah bagai pusat kursus tanpa standar kompetensi dan moral yang jelas sehingga ketika memasuki perguruan tinggi pun para pelajar belum menunjukkan keterampilan belajar serta komitmen yang jelas untuk membangun masa depan mereka sendiri. Bedjo dalam *Jurnal Kependidikan dan Kebudayaan Vidya Karya Tahun XXII Nomor 2, 2003*, halaman. 151-152, menambahkan bahwa pendidikan moral di sekolah tidak efektif sebab selalu tidak dibarengi dengan keteladanan. Krisis moral tidak hanya melanda kalangan remaja tetapi juga melanda generasi tua. Keadaan ini mempersulit pencapaian tujuan pendidikan moral di sekolah karena pada umumnya siswa sulit mencari figur keteladanan dari guru atau pemimpin yang dibanggakan.

Mempertimbangkan berbagai kenyataan pahit yang kita hadapi, integrasi nilai-nilai agama dan karakter ke dalam kurikulum dan pembelajaran pendidikan guru (LPTK) sebagai lembaga penyiap tenaga guru merupakan langkah strategis untuk membangun kembali jati diri bangsa yang religius, berakhlak mulia, dan berkepribadian serta memiliki wawasan keilmuan yang luas. Selain penanaman karakter dan nilai dan moral keagamaan ke dalam kurikulum dan pembelajaran pendidikan guru juga perlu mempertimbangkan tuntutan kualifikasi yang terus meningkat. Meskipun hal ini akan berdampak pada lamanya seseorang menempuh pendidikan persiapan menjadi guru, namun ini merupakan suatu keharusan yang perlu diwujudkan di lembaga pendidikan guru (LPTK) guna menyiapkan guru yang profesional dan berkarakter islami.

Sistem Pengembangan Kurikulum di Pendidikan Guru

Sepanjang sejarahnya sistem pendidikan guru menggunakan kurikulum dengan dua komponen pokok, yaitu: (i) komponen kurikulum untuk memberikan bekal kompetensi kependidikan dan (ii) komponen kurikulum untuk memberikan bekal kompetensi substansi materi yang akan diajarkan. Berlandaskan pada pertimbangan tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000, sejak tahun 2000 pendidikan guru (LPTK) menggunakan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi (*competence based curriculum*). Dalam kebijakan tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan mengenai Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas: (a) Kompetensi utama; (b) Kompetensi pendukung; dan (c) Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama. Selanjutnya disebutkan pula bahwa kompetensi tersebut dikembangkan ke dalam elemen-elemen kompetensi terdiri atas: (a) Landasan kepribadian; (b) Penguasaan ilmu

dan keterampilan; (c) Kemampuan berkarya; (d) Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; (e) Pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Elemen-elemen kompetensi tersebut dikembangkan atas dasar kategorisasi dari *the four pillars of education* UNESCO (1997) yaitu *Learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be*. Dalam implementasinya, elemen elemen yang ditetapkan dalam Permendiknas nomor 045/U/2002 semestinya dijadikan dasar dalam mengembangkan kurikulum pendidikan guru dengan cara mengembangkan mata kuliah yang mengandung kelima elemen tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka kurikulum era tahun 2000 dan 2002 ini mengutamakan pencapaian kompetensi sebagai wujud usaha mendekatkan pada dunia kerja dan industri. Kurikulum era tahun 2000-an ini dikenal dengan sebutan kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum ini terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusi. Impelementasi KBK memerlukan penetapan kompetensi utama oleh kesepakatan bersama antara perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan. Sedangkan kompetensi pendukung dan kompetensi lain, ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Pada perkembangan terakhir pasca tahun 2000-an untuk menghasilkan lulusan pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pemerintah pada tanggal 17 Januari 2012 menetapkan kebijakan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dimuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kebijakan ini didasarkan pada hasil analisis perjalanan kurikulum LPTK dengan mempertimbangkan rekomendasi *Teacher Education Summit* yang dilaksanakan tanggal 14 – 16 Desember 2011 di Jakarta, yang mana pemerintah melalui Ditjen Dikti Kemdikbud mengembangkan model kurikulum sesuai dengan tuntutan kekinian seperti pentingnya menggalakkan kembali pendidikan karakter dan memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran dengan mengacu pada KKNI untuk menjamin mutu calon pendidik profesional.

Penerapan KKNI dalam kurikulum LPTK merupakan hal penting sebagai wujud mutu dan jati diri LPTK terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki LPTK. Dengan KKNI ini hasil pendidikan LPTK akan dilengkapi dengan perangkat ukur yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penjajaran dengan hasil pendidikan bangsa lainnya. Selain itu, dengan KKNI juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menyaring hanya lulusan LPTK yang berkualitas yang dapat bekerja atau menempati profesi pendidik.

Integrasi Nilai-Nilai Agama melalui Pendekatan Transdisiplin dalam Kurikulum LPTK

Transdisiplin adalah suatu pendekatan yang berproses secara simultan untuk meningkatkan perkembangan secara keseluruhan dari setiap individu guna menguasai pengetahuan, keterampilan dasar, dan internalisasi nilai-nilai luhur. Pengembangan pendekatan transdisiplin di lembaga pendidikan guru bertujuan untuk membentuk manusia calon guru yang paripurna (*al-insān al-kāmil*) yang ditandai dengan perkembangan fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual dan intelektual secara optimal dan seimbang. Pandangan seperti ini bertolak dari teori filsafat yang memandang manusia sebagai makhluk individual dan sosial, jasmaniah dan rohaniah, makhluk otonom sekaligus hamba Allah. Dalam konteks tersebut, Krishnamurti (1955: 15) menegaskan bahwa; “*The highest function of education is to bring about an integrated individual who is capable of dealing with life as a whole*”;. Pernyataan ini bermakna bahwa fungsi terpenting pendidikan adalah menghasilkan manusia yang mampu menyatu dengan kehidupan sebagai satu kesatuan.

Implementasi pendekatan transdisiplin dalam kurikulum dan pembelajaran dilakukan dengan cara mengaitkan antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lainnya yang bertujuan saling menguatkan antara satu dengan lainnya. James A Beane (1997: 43) mengatakan tujuan integrasi kurikulum dari berbagai disiplin ilmu adalah menghubungkan antar pengetahuan, pengalaman, nilai-nilai sosial dan dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Pernyataan ini mengandung arti bahwa integrasi nilai-nilai agama ke dalam kurikulum dan pembelajaran ilmu-ilmu sains atau ilmu umum lainnya di lembaga pendidikan guru bertujuan membentuk pribadi mahasiswa calon guru supaya menjadi manusia yang religius, berilmu, warga masyarakat dan warga negara yang baik.

Kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah memegang teguh nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pelaksanaan integrasi nilai-nilai agama ke dalam kurikulum dan pembelajaran di LPTK akan memberikan informasi pengajaran dan pelaksanaan perintah agama, nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa, dalam rangka membina kepribadian dan moral generasi muda. Salah satu bentuk wujud atau contoh pelaksanaan model integrasi nilai-nilai agama ke dalam proses pembelajaran dicontohkan oleh S.R Sharma (2006:50) pada mata kuliah Sejarah yang menceritakan contoh balasan-balasan perbuatan baik. maka, mahasiswa akan belajar tentang

peperangan yang disebabkan konflik keagamaan, pemberontakan, gerakan-gerakan revolusi atau protes, atau tentang diskriminasi hak pada masa lalu. Melalui materi-materi ini mereka diajarkan berpikir secara historis dan mereka terlibat dengan berbagai permasalahan sikap, perasaan, dan perilaku moral yang terabaikan. Proses ini diharapkan akan berdampak yaitu dapat mengembalikan mahasiswa calon guru pada karakter dasarnya sebagai manusia. Karakter dasar manusia terdiri dari: dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, jujur, tanggung jawab; kewarganegaraan, ketulusan, berani, tekun, disiplin, visioner, adil, dan punya integritas. Atas dasar itu, maka integrasi nilai-nilai agama ke dalam mata kuliah sains atau umum dengan berpijak kepada nilai-nilai karakter dasar tersebut, yang kemudian dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lingkungan itu sendiri.

Integrasi Nilai-nilai Karakter dalam Kurikulum LPTK

Pendidikan karakter juga dikenal dengan istilah pendidikan watak bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai tradisional tertentu, nilai-nilai yang diterima secara luas sebagai landasan perilaku yang baik dan bertanggungjawab. Nilai-nilai juga digambarkan sebagai perilaku moral. (Darmiyati Zuchdi, 2008:39).

Pendidikan karakter merupakan bagian terpenting dari keseluruhan aktivitas pendidikan, Dalam Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, dinyatakan bahwa pendidikan dilaksanakan sebagai usaha sadar, terencana, dan berkesinambungan dengan berupaya memfasilitasi atau memberi bantuan kemudahan kepada peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, sehingga ia berdaya atau berkemampuan melaksanakan tugas dan mengambil peran terbaik dalam kehidupan masa depannya.

Praktik pelaksanaan pendidikan yang berupaya memfasilitasi atau memberi bantuan kepada peserta didik calon guru dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pembimbingan, pengarahan, pengajaran, pelatihan, pembiasaan, pelakonan, pemberian motivasi dan dorongan, pemberian contoh atau teladan, dan masih banyak lagi aktivitas edukatif lainnya. Kesemua itu ditujukan ke arah pengembangan potensi peserta didik secara maksimal, seperti potensi berpikir, merasa, dan bertindak, sehingga peserta didik dapat berdaya atau berkemampuan untuk melaksanakan tugas dan mengambil peran-peran terbaik dalam kehidupan sesuai dengan tuntutan zamannya.

Dalam konteks dapat melaksanakan tugas dan mengambil peran terbaik, peserta didik calon guru berkemampuan menampilkan sikap dan perilaku mulia atau terpuji

sesuai karakter mulia yang diidealkan masyarakat dan bangsanya. Karena itu, setiap masyarakat berharap agar pendidikan tidak hanya mengemban tugas mentransformasi ilmu pengetahuan dan pelatihan keterampilan saja, tetapi juga membentuk karakter peserta didik calon guru sesuai dengan jati diri masyarakat dan bangsanya. Inilah cita dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan. Sebagai manusia peserta didik calon guru memiliki berbagai karakteristik utama, yaitu kualitas yang menunjukkan cara-cara khusus dalam berfikir, bertindak, dan merasakan berbagai situasi. Karakteristik ini dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu: (1) karakteristik kognitif, yang berhubungan dengan cara berfikir; (2) karakteristik psikomotorik, yang berhubungan dengan cara bertindak yang khas, dan (3) karakteristik afektif yang berhubungan dengan cara-cara yang khas dalam merasakan atau mengungkapkan sikap.

Pendidikan karakter merupakan proses edukasi untuk membentuk perilaku, berbuat, berpikir, bersikap, dan merasa. Atas dasar itu, maka proses pendidikan bagi peserta didik perlu disesuaikan dengan kaedah-kaedah moral dan norma. Moral dan norma itu digali dan dikembangkan dari sistem nilai (*value system*) dan sistem kepercayaan (*belief system*) yang ada, hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan sistem nilai dan sistem kepercayaan inilah dirumuskan nilai-nilai karakter mulia peserta didik yang diharapkan dapat dibentuk melalui proses pendidikan. Menurut Al-Rasyidin, (2011) dalam makalahnya dengan judul. "Membangun Pendidikan Karakter: Sketsa Masalah dan Gagasan tentang Pendidikan Karakter", proses pembentuk karakter peserta didik perlu dilaksanakan dengan melibatkan secara utuh, integral, dan seimbang aktivitas olah raga, olah pikir, olah jiwa, dan olah rasa.

Menurut Thomas Lickona, (1991) aktivitas mendidikkan karakter tidak boleh hanya sebatas mengajarkan tentang karakter saja, melainkan pelaksanaan pendidikan karakter adalah proses pembentukan perilaku mulia yang hasilnya harus terlihat dalam tindakan nyata peserta didik, yaitu tingkah laku yang baik, seperti jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya. Karena itu, proses pembelajaran dalam pembentukan karakter tidak boleh hanya terbatas pada aktivitas kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Susilo Bambang Yudoyono Presiden RI dalam sambutannya pada Peringatan Hardiknas 2010 menyatakan: orang-orang yang berkarater kuat dan baik, apakah perseorangan, masyarakat atau bahkan bangsa, adalah mereka yang memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik. Bagaimana membentuk manusia, anak didik agar memiliki karakter seperti itu? Pertama-tama, proporsi antara teori dan praktik harus diubah. Teori cukup sekitar 30 persen. Sisanya, harus diimbangi dengan praktik dan pembiasaan untuk disiplin, tidak mudah menyerah, menghargai yang

lain, dan sebagainya. Dalam pendidikan karakter perlu contoh dan teladan konkrit tidak bisa dididikkan secara teoretik saja, melainkan menghendaki proses penghayatan, pelakonan, dan praktik nyata.

Kosasih A. Djahiri (2004) mengatakan pendidikan karakter harus berorientasi secara simultan pada *content-oriented* dan *process-oriented*. Hal ini penting dilakukan guru agar peserta didik tidak hanya dilibatkan pada aktivitas kognitif, tetapi juga mengembangkan keterampilan afektual dan partisipatorik. Keterampilan afektual dikembangkan melalui proses *emoting*, *mindng* atau *sense of ...*, *valuing skills*, *mental round trip*, dan *taking position*. *Emoting*, *mindng* atau *sense of ...* adalah proses di mana guru memberdayakan kemampuan *inner mental* peserta didiknya sehingga mampu merasakan dan *nyawang* akan suatu nilai, moral, atau norma berkenaan dengan karakter mulia (olah rasa). *Valuing skills* adalah proses di mana pendidik menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap peserta didik melatih keterampilannya dalam memaknai atau menilai suatu hal – apakah menyangkut orang, objek, gagasan, perilaku, situasi atau kondisi – dengan menggunakan ukuran nurani, kalbu, atau kata hati (olah jiwa). *Mental round trip* adalah proses di mana guru membimbing, melatih, dan membiasakan peserta didik mengembangkan diri untuk melaksanakan suatu peran yang berkaitan dengan karakter mulia yang akan dibentuknya (olah raga). Sedangkan *taking position* adalah berketetapan hati dalam mengambil suatu keputusan untuk memilih, menghargai, dan menampilkan suatu karakter mulia (*choosing, prizing, and acting*).

Selain itu, keterampilan partisipatorik harus pula dikembangkan para pendidik melalui serangkaian aktivitas *interacting* (seperti bekerjasama dalam kelompok), *monitoring* (seperti mengamati perilaku individu yang berkarakter mulia), dan *influencing* (seperti memberikan komentar dan pandangannya tentang suatu perilaku karakter dari sudut pandang nilai, moral, atau norma).

Dimensi penting lainnya yang tidak bisa diabaikan dalam upaya mewujudkan pendidikan karakter mulia adalah keharusan adanya daya dukung partisipatif dari semua komunitas lembaga pendidikan. Tugas membentuk karakter mulia peserta didik calon guru bukan hanya tugas dan tanggung jawab dosen agama saja, tetapi tugas dan tanggung jawab semua komunitas lembaga pendidikan guru. Setidaknya, seluruh komunitas lembaga harus berpartisipasi aktif dalam menciptakan dan mengembangkan contoh-contoh dan teladan konkrit dari perilaku yang berkarakter mulia di lingkungan lembaga pendidikan guru. Kesemuanya harus senantiasa menyadari bahwa karakter hanya dapat dibentuk dengan baik dan ditampilkan secara personal oleh peserta didik manakala

mereka dibelajarkan melalui contoh atau teladan konkrit (*modelling*), bukan melalui pesan-pesan verbal belaka.

Pendidikan karakter pada pendidikan guru dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode langsung dan tak langsung. Penerapan metode pembelajaran metode langsung dimulai dengan cara lembaga atau prodi terlebih dahulu mensepakati perilaku-perilaku yang dinilai baik, sebagai upaya indoktrinasi berbagai ajaran. Caranya adalah dengan memusatkan perhatian secara langsung pada ajaran tersebut lewat mendiskusikan, mengilustrasikan, menghafalkan, dan mengungkapkannya. Sedangkan metode tak langsung tidak dimulai dengan menentukan perilaku yang diinginkan, tetapi dengan menciptakan situasi yang memungkinkan perilaku yang baik dapat dipraktikkan. Karena itu, keseluruhan pengalaman mahasiswa selama proses pendidikan di lembaga pendidikan guru hendaknya dimanfaatkan untuk mengembangkan perilaku-perilaku yang baik.

Contoh pendidikan karakter dengan menerapkan metode langsung misalnya, mata kuliah Pancasila dengan menanamkan pendidikan nilai-nilai Pancasila, dan mata kuliah agama dengan menanamkan nilai-nilai agama. Menurut Darmiyati Zuchdi (2008:5), jika pendidikan karakter dilaksanakan dengan menggunakan metode langsung, maka ciri-ciri indoktrinasi tak dapat dihindari. Indoktrinasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu *Pertama*, nilai-nilai yang diindoktrinasi diserap, bahkan dihafal di luar kepala, tetapi tidak terinternalisasi apalagi teramalkan. *Kedua*, nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan, tetapi berkat pengawasan pihak penguasa, bukan atas kesadaran diri. Dalam hal ini nilai moral yang pelaksanaannya seharusnya bersifat sukarela (*voluntary action*) berubah menjadi nilai hukum yang dalam segala aspeknya memerlukan pranata hukum.

Pada bagian lain, Darmiyati Zuchdi (2008:46) menyarankan agar pendidikan nilai/moral seharusnya tidak menggunakan metode indoktrinasi yang memiliki ciri-ciri bertolak belakang dengan inkulkasi, yakni sebagai berikut:

- a. mengomunikasikan kepercayaan hanya berdasarkan kekuasaan
- b. memperlakukan orang lain secara tidak adil
- c. memfitnah dan menjelek-jelekkkan pandangan orang lain
- d. menyatakan keragu-raguan atau perasaan tidak percaya secara kasar dan mencemoohkan atau memingkandang rendah
- e. sepenuhnya mengonrol lingkungan untuk meningkatkan kemungkinan penyampaian nilai-nilai yang tidak dikehendaki

- f. menciptakan pengalaman sosial dan emosional mengenai nilai yang dikehendaki secara ekstrem
- g. membuat aturan, memberikan penghargaan dan memberikan konsekuensi tanpa disertai alasan
- h. memutuskan komunikasi dengan pihak yang tidak setuju
- i. tidak memberikan peluang bagi adanya perilaku yang berbeda-beda apabila sampai pada tingkat yang tidak dapat diterima, yang bersangkutan dikucilkan untuk selamanya.

Strategi yang lazim digunakan dalam pendidikan nilai dan spritualitas adalah dengan menggunakan pemodelan dan pembeian keteladan. Penerapan strategi keteladanan dan pemodelan di lembaga pendidikan guru dengan mempersyaratkan dua syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu:

Pertama, para mahasiswa sebagai calon pendidik dan orang tua harus bisa berlatih untuk berperan sebagai model yang baik, misalnya dalam hal menyelesaikan masalah secara adil, menghargai pendapat orang lain, mengkritik orang lain secara santun. *Kedua*, mahasiswa calon guru harus bisa meneladani orang-orang terkenal yang berakhlak mulia, misalnya Nabi Muhammad saw.

Berlatih sebagai calon pendidik dan orang tua yang dapat bertutur kata dan bertindak yang santun, supaya mereka terbiasa untuk tidak menanamkan nilai-nilai karakter yang negatif ke dalam diri peserta didik. Karena itu, mahasiswa calon guru perlu dilatih keterampilan asertif dan keterampilan menyimak. Kedua keterampilan ini sangat diperlukan untuk menjalin hubungan antarpribadi dan antar kelompok. Keterampilan aservatif adalah keterampilan mengemukakan pendapat secara terbuka, dengan cara-cara yang tidak melakaui orang lain. Sedangkan keterampilan menyimak adalah keterampilan mendengarkan dengan penuh pemahaman dan secara kritis. Menurut pandangan Kirschhenbaum (1995:86), ciri-ciri orang yang dapat berfikir kritis adalah:

- a. mencari kejelasan pernyataan atau pertanyaan;
- b. mencari alasan
- c. mencoba memperoleh informasi yang benar
- d. menggunakan sumber yang dapat dipercaya
- e. mempertimbangkan keseluruhan situasi
- f. mencari alternatif
- g. bersikap terbuka
- h. mengubah pandangan apabila ada bukti yang dapat dipercaya
- i. mencari ketepatan suatu permasalahan

- j. sensitif terhadap perasaan, tingkat pengetahuan, dan tingkat kecanggihan orang lain.

Selain mampu berfikir kritis, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Weiss, (1973) dalam Darmiyati Zuchdi, (2008:29-32) disarankan ada 21 kompetensi afektif yang perlu dimiliki guru sehingga ia dapat berperan positif dalam pengembangan karakteristik afektif pada diri peserta didik. Berbagai kompetensi afektif yang harus dimiliki oleh guru, yaitu:

1. menunjukkan ketajaman perhatian
 - a. menyadari situasi kelas
 - b. menanggapi murid dan situasi dengan mendengarkan, berbicara, dan bertindak
2. menunjukkan sikap positif
 - a. senang bekerja dengan murid
 - b. mengharapkan agar murid-murid berhasil
 - c. mengutarakan secara otomatis tentang etos kerja, motivasi belajar, dan profesinya sebagai pendidik
3. menunjukkan keramah tamahan dan kegembiraan
 - a. sering tersenyum
 - b. menyenangkan dan bijaksana
 - c. akrab dengan murid-murid
4. dapat menjaga rahasia
menyimpan dan tidak menyebarluaskan informasi tentang rahasia murid
5. mempraktekkan kerjasama
 - a. secara sukarela berpartisipasi dalam kegiatan murid
 - b. secara sukarela memberikan pertolongan kepada murid
 - c. menunjukkan kemampuan “memberi dan menerima” di kelas
6. menunjukkan empati dan memahami kebutuhan murid
 - a. sensitif, penuh perhatian terhadap kebutuhan murid
 - b. menunjukkan kemampuan berada pada posisi orang lain (memiliki empati)
 - c. memahami kebutuhan murid, tetapi tidak sentimental, membedakan masalah-masalah pribadi murid dari masalah umum
7. menunjukkan antusiasme
 - a. menunjukkan tanggungjawab terhadap murid dan tugas mengajar
 - b. membangkitkan kesenangan akan konsep-konsep yang dipelajari di kelas (murid-murid responsif dan tampak senang di kelas)

8. mengakui kesalahan
 - a. mengakui ketidakmampuan menjawab pertanyaan , melakukan koreksi atas kesalahan sendiri
 - b. meminta dan menggunakan kritik yang konstruktif
9. menunjukkan keadilan
 - a. menerima dan mengatasi isu-isu kontroversial tanpa memihak
 - b. menolong murid melihat permasalahan dari berbagai sisi
10. menunjukkan kejujuran dan keikhlasan (ketulusan hati)
 - a. menunjukkan perasaan yang sebenarnya, konsisten, tampil sebagaimana adanya, dan ikhlas
11. menunjukkan sikap rajin dan penuh inisiatif
 - a. merencanakan dan menyusun pembelajaran sebelum batas akhir
 - b. mengerjakan tugas lebih dari yang seharusnya dikerjakan
12. menunjukkan sikap keternukaan dan menerima ide-ide baru
 - a. mendengarkan ide-ide baru dari murid dan tampak senang menerimanya
 - b. mengundang kritik, diskusi, dan pertanyaan
13. menunjukkan pandangan yang optimistik
14. menunjukkan kesadaran akan harga diri positif dan stabilitas emosi
 - a. memandang dirinya berharga
 - b. tampak dapat melakukan kontrol diri, menjaga keseimbangan emosi
15. menunjukkan sikap humor
 - a. berkelakar dan tertawa dengan murid-murid di kelas guna menumbuhkan suasana santai
16. menunjukkan kesungguhan
17. menunjukkan sikap bijaksana
berhubungan dengan murid-murid dengan cara yang tidak mempermalukan mereka
18. menunjukkan sikap toleran dan sabar
memahami tingkah laku murid sesuai dengan latar belakangnya
19. menunjukkan pengaruh positif
 - a. mendorong murid-murid berbuat baik
 - b. menggunakan ekspresi wajah dan isyarat untuk mendukung persetujuan
20. menunjukkan kemampuan memimpin
membimbing murid mencapai tujuan, mengontrol tindakan murid
21. responsif terhadap kebutuhan individu

Berbagai kompetensi afektif yang disarankan harus dimiliki seorang guru perlu dikembangkan dalam kurikulum dan pembelajaran dalam pendidikan guru dalam kerangka menyiapkan mahasiswa calon guru untuk dapat berperan positif dan mengambil peran terbaiknya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya setelah mereka menjalankan karir dan tugas profesinya sebagai guru.

Integrasi KKNi dan SNPT dalam Kurikulum LPTK

Implikasi diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi), yang kemudian disusul dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi bidang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), maka mulai tahun 2012 pengembangan kurikulum termasuk kurikulum LPTK wajib merujuk kepada cakupan capaian pembelajaran yang ditunjukkan oleh setiap lulusan dengan merujuk kepada cakupan deskripsi umum dan deskripsi jenjang kualifikasi 6 dan 7. Sedangkan pembentukan sikap bagi mahasiswa calon guru dengan mengacu kepada SN-DIKTI Nomor 49 tahun 2014.

Pengembangan kurikulum LPTK mengacu KKNi dan SNPT dalam kerangka menyiapkan sosok lulusan dengan merujuk kepada standar nasional yang disesuaikan dengan karakteristik pendidikan tinggi yaitu berkewajiban menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perwujudan kurikulum KKNi dan SNPT menghendaki agar pengembangan kurikulum LPTK dengan terlebih dahulu menetapkan konsep lulusan dengan mempertimbangkan konsep yang termuat dalam visi dan misi institusi. Konsep lulusan tersebut selanjutnya diwujudkan sebagai profil lulusan. Profil lulusan ditetapkan dengan mengacu pada rumusan mutu lulusan dan relevansi. Kesemuanya itu akan dicapai melalui suatu rangkaian proses pendidikan yang bermutu, baik untuk pendidikan akademik maupun pendidikan profesi.

Ada dua kata kunci untuk mengaitkan antara kurikulum dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yaitu capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dan kualifikasi. Pengemasan capaian pembelajaran ke dalam jenjang kualifikasi KKNi sangat penting untuk keperluan penyandingan maupun penyeteraan kualifikasi dan atau rekognisi antara tingkat pendidikan dan atau tingkat pekerjaan. Selain itu, pengemasan capaian pembelajaran ke dalam KKNi juga untuk keperluan harmonisasi dan kerjasama saling pengakuan kualifikasi dengan negara lain, baik secara bilateral maupun secara

multilateral. Pengembangan kurikulum yang mengacu pada deskriptor jenjang kualifikasi memerlukan tingkatan capaian pembelajaran yang dimulai dari tingkat universitas (*university learning outcomes*) hingga tingkat program studi (*program learning outcomes*) dan capaian pembelajaran perkuliahan (*course learning outcomes*) yang disandingkan dengan jenjang kualifikasi.

Ada perbedaan makna antara kualifikasi dan jenjang kualifikan. Menurut Perpres Nomor 8 Tahun 2012, kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI. Sedangkan jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja. Kualifikasi adalah sebuah istilah yang secara internasional disepakati sebagai pencapaian penguasaan seseorang atas badan pengetahuan (*body of knowledge*) dengan keluasan dan kedalamannya yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Dengan adanya KKNI ini akan merubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata pada ijazah tetapi didasarkan pada pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas yang akuntabel dan transparan.

Selain mempertimbangkan hal di atas, pembinaan keahlian dan sikap bagi mahasiswa calon guru dilaksanakan melalui proses penerapan kurikulum di LPTK dengan mempertimbangkan keunikan karakteristik profesi guru yaitu: (1) subyek layanan adalah manusia; (2) individu yang unik yang berkembang; (3) secara hakiki tidak berbeda dari pendidik; (4) subyek layanan yang memiliki berbagai potensi; (5) keputusan-keputusan profesional dilakukan dalam situasi transaksional yang dinamis. Oleh itu, pengembangan ilmu pendidikan juga merupakan tugas program akademik dan profesi, dan karena sifat profesi guru yang unik, maka calon lulusan harus dibekali dengan teori dan praktek, serta kemampuan meneliti.

Model atau Pola Integrasi KKNI dan SNPT dalam Kurikulum LPTK

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan/strategi, metode dan teknik pembelajaran

Ada dua model atau pola integrasi KKNI dalam kurikulum LPTK guna menyiapkan guru profesional, yaitu: (1) dengan pola yang terintegrasi antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi, artinya level 6 dan 7 dilaksanakan secara bersamaan, atau (2)

dengan pola yang berlapis, yaitu pendidikan akademik terlebih dahulu baru dilanjutkan pendidikan profesi, artinya level 6 terlebih dahulu, baru dilanjutkan pada level 7.

Deskriptor KKNI di setiap jenjang mengandung tiga capaian yang diharapkan. *Pertama* adalah ketrampilan (kognitif dan psikomotorik) yang dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan program perkuliahannya. *Kedua*, pengetahuan (*content knowledge*) yang melandasi keterampilan yang dimiliki agar mampu beradaptasi dengan perubahan di masa datang. *Ketiga*, kemampuan manajerial bagi keterampilan dan pengetahuan yang dikuasai agar dapat berkembang sesuai dengan tuntutan profesionalnya.

Keberadaan Pendidikan Profesi Guru menjadi tuntutan setelah dikeluarkannya Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mempersyaratkan bahwa guru profesional harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik harus menjadi jaminan bahwa seorang guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Frase *mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional* perlu dimaknai dalam konteks arahan Pasal 1 (1), Pasal 3, dan Pasal 4 (khususnya ayat 3) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Arahan pasal dan ayat yang disebutkan mengandung implikasi keterkaitan erat dengan keunikan karakteristik profesi pendidik/guru, sebagaimana dijelaskan, dan implikasi pedagogis untuk mewujudkan pembelajaran yang mendidik, yang harus didukung oleh keutuhan penguasaan kompetensi akademik dan profesional kependidikan.

Berdasarkan kerangka pikir peraturan dan perundang-undangan tersebut, penyelenggaraan program Pendidikan Profesional Guru memerlukan dua tahapan, yakni (1) Pendidikan Akademik Guru (berujung penganugerahan sarjana S1 kependidikan), dan (2) Pendidikan Profesi Guru (program pendidikan setelah S1 kependidikan, berujung penganugerahan sertifikat pendidik). Atas dasar itu, maka model pengembangan kurikulum di LPTK dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

Pertama, keutuhan Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi, yaitu penyelenggaraan pendidikan akademik guru yang kemudian diteruskan ke pendidikan profesi guru sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pendidikan Profesional Guru. Keseluruhan proses penyiapan guru yang mencakup pendidikan akademik dan pendidikan profesi tersebut harus merupakan suatu keutuhan sejak rekrutmen, pelaksanaan, hingga penetapan kelulusan. Prinsip keutuhan ini penting mengingat pendidikan profesi guru yang ditegaskan dalam Permendiknas RI Nomor 8 Tahun

2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan tidak mengatur pendidikan guru pada tingkat pendidikan akademik.

Kedua, keterkaitan Mengajar dan Belajar. Prinsip ini menunjukkan bahwa bagaimana cara guru mengajar harus didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana peserta didik sebenarnya belajar dalam lingkungannya. Dengan demikian penguasaan teori, metode, strategi pembelajaran yang mendidik dalam perkuliahan di kelas harus dikaitkan dan dipadukan dengan bagaimana peserta didik belajar di sekolah dengan segenap latar belakang sosial-kulturalnya. Cara guru mengenal dan merespon perilaku belajar peserta didik di kelas adalah penting karena akan membentuk hakikat lingkungan pembelajaran (*shaping the nature of the teaching and learning environment*) (Loughran, 2010). Oleh karena itu, pada struktur kurikulum pendidikan akademik untuk calon guru (program studi kependidikan) harus menempatkan penajaman awal (*early exposure*) terhadap praktik pembelajaran di sekolah-sekolah mitra agar calon guru lebih memahami hakikat pembelajaran yang mendidik. Dalam konteks ini, pedagogi harus dipahami sebagai konsep yang merujuk kepada aspek-aspek belajar, sebagai berikut:

Pertama, pedagogi berkaitan dengan apa dan bagaimana peserta didik belajar; *Kedua*, pedagogi berkaitan dengan bagaimana guru sebagai pembelajar belajar tentang mengajar dan membentuk keahliannya sebagai seorang profesional. *Ketiga*, adanya koherensi antar konten Kurikulum. Koherensi mengandung arti keterpaduan (*unity*), keterkaitan (*connectedness*), dan relevansi (*relevance*). Koherensi dalam konten kurikulum pendidikan guru bermakna adanya keterkaitan di antara kelompok mata kuliah bidang studi (*content knowledge*), kelompok mata kuliah yang berkaitan dengan pengetahuan tentang metode pembelajaran secara umum (*general pedagogical knowledge*) yang berlaku untuk semua bidang studi dan situasi, pengetahuan yang berkaitan dengan pendekatan dan metode pembelajaran bidang studi tertentu (*content specific pedagogical knowledge*), pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan kurikulum (*curricular knowledge*), pengetahuan dan keterampilan dalam pemilihan dan pengembangan alat penilaian (*assessment and evaluation*), pengetahuan tentang konteks kependidikan (*knowledge of educational context*), dan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran (*information technology*).

Selain koherensi internal, kurikulum untuk program studi/jurusan kependidikan juga harus memperhatikan pula keterkaitan kontennya baik pedagogi umum, pedagogi khusus maupun konten mata kuliah keahlian dan keterampilan

dengan realitas pembelajaran di kelas sehingga terbangun keterkaitan kurikulum program studi dengan kebutuhan akan pembelajaran di kelas atau sekolah (*university-school curriculum linkage*).

Ada empat model pengembangan kurikulum LPTK, yang secara potensial bisa dipertimbangkan sebagai pilihan model, yaitu: (1) model Terintegrasi antara Pendidikan Akademik dengan Pendidikan Profesi 1 semester; (2) model Terintegrasi antara Pendidikan Akademik Berkewenangan Tambahan dengan Pendidikan Profesi 1 Semester; (3) Model Terintegrasi Pendidikan Akademik dengan Pendidikan Profesi 2 Semester; (4) Model Terintegrasi antara Pendidikan Akademik Berkewenangan Tambahan dengan Profesi 2 Semester. Dari empat model pengembangan kurikulum LPTK yang secara potensial bisa dipertimbangkan, menurut hemat penulis adalah model pengembangan kurikulum bagi calon guru lebih efektif dengan memilih Model Terintegrasi antara Pendidikan Akademik dengan Pendidikan Profesi 2 Semester, yang digambar sebagai berikut:



Sumber: Buku Panduan Penyusunan Kurikulum LPTK

Pada model ini, kurikulum LPTK diselenggarakan secara terintegrasi antara program pendidikan akademik yang tersebar dalam 8 semester dengan pendidikan profesi guru yang di dalamnya ada workshop SSP dan PPL selama 2 semester bagi calon guru bidang studi. Pendidikan akademik terdiri dari elemen karakter dan keindonesiaan, akademik kependidikan, akademik bidang studi, metodik khusus, dan elemen KKN, penelitian tugas akhir (skripsi), dan ujian tugas akhir. Selama 3 semester mulai semester 2, semester 4, dan semester 6 dilaksanakan program magang kependidikan sebagai program pengenalan lingkungan sekolah sejak awal (*early exposure on school setting*). Pada semester 9 dilaksanakan program PPG yang terdiri dari workshop *subject specific pedagogy* (SSP), dan PPL pada semester 10 bagi calon guru bidang studi.

Elemen-elemen Kurikulum LPTK

Keutuhan kurikulum LPTK terdiri dari elemen-elemen yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dilengkapi dengan elemen spesifik yang menjadi karakteristik penyiapan calon guru profesional.

Elemen-elemen kurikulum LPTK sebagai berikut.

- a. Nasionalisme dan landasan kepribadian;
- b. Penguasaan akademik kependidikan
- c. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- d. Kemampuan dan keterampilan berkarya;
- e. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai;
- f. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Berikut penjelasan dari tiap-tiap elemen kompetensi tersebut adalah:

- 1. Nasionalisme Landasan kepribadian**, yaitu elemen kompetensi yang sepatutnya dimiliki para calon guru berkaitan dengan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia yang antara lain ditandai dengan jiwa kebangsaan (nasionalisme), cinta tanah air dan berperilaku sesuai dengan prinsip dan nilai Pancasila.
- 2. Penguasaan Akademik Kependidikan**, yaitu elemen kompetensi yang harus dimiliki para calon guru dalam hal penguasaan kompetensi akademik kependidikan, antara lain penguasaan makna dan filsafat pendidikan, penguasaan dimensi perkembangan kepribadian peserta didik, kemampuan pendekatan perkembangan (psikologis) dalam pembelajaran peserta didik, kemampuan memahami dan mengembangkan dimensi belajar dan pembelajaran, penguasaan teknologi, informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, serta penguasaan asesmen berbasis perkembangan peserta didik. Melalui penguasaan akademik kependidikan inilah akan dihasilkan profil pendidik yang unggul dalam kompetensi pedagogik.
- 3. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga**. Elemen ini berkaitan dengan kemampuan pendidik dalam hal penguasaan substansi bidang keahlian sesuai dengan program studi masing-masing. Penguasaan tersebut disertai dengan kemampuan pendidik dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, memiliki jiwa seni dan kesamaptaan jasmani.
- 4. Kemampuan dan keterampilan berkarya**. Elemen ini berkaitan dengan kemampuan unjuk kerja sebagai seorang pendidik yang kompeten, terampil,

komunikatif, sadar mutu, yang ditandai dengan kemampuan melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

5. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai. Elemen ini berkaitan dengan karakter pendidik yang kuat sebagai hasil dari olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa/karsa. Karakter yang kuat tercermin pada nilai utama karakter jujur, cerdas, tangguh dan peduli.

6. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Elemen ini berkaitan dengan kemampuan pendidik dalam berkomunikasi dengan masyarakat, baik melalui lisan, tulisan, atau isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.

Keenam elemen kurikulum tersebut berkaitan erat dan merupakan koherensi yang utuh untuk mengantarkan para calon guru ke arah sosok guru masa depan yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan. Koherensi keenam elemen kurikulum mengandung makna adanya keterpaduan (*unity*), keterkaitan (*connectedness*), dan relevansi (*relevance*) antar elemen kurikulum yang dikembangkan. Koherensi elemen kurikulum pendidikan guru juga mengandung makna adanya keterkaitan di antara kelompok mata kuliah umum (*general science*) dan Ke-Indonesiaan, kelompok mata kuliah bidang studi (*content knowledge*) atau *subject specific knowledge*, kelompok mata kuliah yang berkaitan dengan pengetahuan tentang metode pembelajaran secara umum (*general pedagogical knowledge*), pengetahuan yang berkaitan dengan pendekatan dan metode pembelajaran bidang studi tertentu (*pedagogical content knowledge*), pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan kurikulum (*curricular knowledge*), pengetahuan dalam menganalisis karakter peserta didik (*knowledge about learner*), pengetahuan dan keterampilan dalam pemilihan dan pengembangan alat penilaian (*assessment and evaluation*), pengetahuan tentang konteks kependidikan (*knowledge of educational context*), dan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran (*technological pedagogical content knowledge*). Koherensi antar elemen dalam struktur kurikulum ini diharapkan dapat menghasilkan hasil belajar yang sesuai dengan yang dirumuskan dalam capaian hasil belajar setiap program studi.

Keenam elemen kurikulum di atas juga merupakan dasar bagi pengelompokan mata kuliah, baik mata kuliah yang termasuk kurikulum inti, maupun mata kuliah yang termasuk pilihan (*elektif*).

Pengelompokan Mata Kuliah Kurikulum LPTK

Pengelompokan rumpun mata kuliah berdasarkan tema kajian, dapat dikembangkan oleh dan menjadi kewenangan LPTK masing-masing. Pengelompokan mata kuliah dapat didasarkan pada karakteristik yang sama dari capaian pembelajaran perkuliahan, atau keterkaitan antar konsep esensial dari setiap *content knowledge* yang ada dalam capaian pembelajaran perkuliahan (*course learning outcomes*). Berikut adalah, contoh pengelompokan mata kuliah.

1. Kelompok Mata Kuliah Umum (MKU)
2. Kelompok Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK)
3. Kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK)
4. Kelompok Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP)
5. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP)

Kelompok mata kuliah umum (*general science*) dan keIndonesiaan, yaitu kelompok mata kuliah yang berhubungan dengan elemen kurikulum yang berhubungan dengan pengembangan jiwa kebangsaan, cinta tanah air, sosial, kepribadian, dan karakter bangsa. Kelompok mata kuliah umum ini membekali para mahasiswa sebagai calon guru dengan kompetensi dasar umum, yang kandungannya antara lain meningkatkan keimanan dan ketakwaan, keIndonesiaan yang didampingi penumbuhan kemandirian berpikir, cerdas, terampil, menghormati keragaman budaya, menjunjung tinggi etika dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa dan tanah air. Yang termasuk dalam Kelompok Mata Kuliah Umum (MKU) adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Pendidikan Sosial dan Budaya (PSB), Pendidikan Jasmani dan Olah Raga, Matematika atau Statistika atau Logika, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Kelompok Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) yaitu kelompok mata kuliah dasar akademik kependidikan yang membekali para calon pendidik dengan kompetensi dasar yang berkaitan dengan dasar keilmuan mendidik (*scientific basis of the art of teaching*). Beberapa mata kuliah dapat berupa Filsafat Pendidikan, Psikologi Pendidikan, Bimbingan dan Konseling, Kurikulum dan Pembelajaran, dan Pengelolaan Pendidikan.

Kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK) yaitu mata kuliah yang berkaitan dengan kompetensi akademik substansi kajian utama (*content knowledge*) yang sesuai dengan jurusan atau program studi masing-masing. Termasuk dalam kelompok ini adalah mata kuliah Program Pengenalan Lapangan, Magang, dan PPG. Dalam kelompok ini juga termasuk mata kuliah pilihan (*elective*) yang dikembangkan dalam bentuk paket pilihan

mata kuliah guna memperkuat dan memperdalam kompetensi utama lulusan (yang relevan dengan rumpun bidang studinya) yang sejalan dengan visi dan misi program studi/jurusan. Mata kuliah pilihan juga dapat memberikan kemampuan tambahan yang memungkinkan lulusan memiliki kewenangan tambahan untuk menghadapi situasi lapangan yang beragam. Semua Mata kuliah pilihan dapat diambil dalam program studi sendiri dan/atau di luar program studi serumpun dan dapat berubah (*fleksibel*) sesuai kebutuhan.

Kelompok Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP) yaitu kelompok mata kuliah ini yang merupakan elemen kompetensi khusus yang mencakup teori dan praktek pelaksanaan proses pembelajaran untuk kelompok peserta didik dan bidang studi tertentu (*content specific pedagogy*). Kelompok mata kuliah ini diarahkan pada kecakapan yang berhubungan praktek pengembangan perangkat pembelajaran di sekolah (silabus, RPP, pengembangan materi ajar, pendekatan, metode dan teknik pembelajaran, media pembelajaran, alat penilaian). Kelompok mata kuliah ini juga mengaplikasikan prinsip, konsep, dan teori yang dibahas di perkuliahan; interaksi pembelajaran di kelas; dan kegiatan pembelajaran lainnya, seperti remedial. Termasuk ke dalam kelompok mata kuliah ini adalah Strategi Pembelajaran Bidang Studi, Media Pembelajaran dan TIK Bidang Studi; Penelitian Bidang Studi; Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Bidang Studi; dan Belajar dan Pembelajaran Bidang Studi, dan Evaluasi Bidang Studi.

Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP) yaitu mata kuliah yang membekali para calon guru untuk dapat mengembangkan keilmuan dari bidang studi yang ditekuninya berdasarkan praksis praksis pendidikan yang dianalisis dengan bekal metodologi penelitian baik secara kualitatif dan kuantitatif, termasuk di dalamnya Inovasi Pendidikan. Kelompok mata kuliah ini adalah: Metodologi Penelitian, Inovasi Pendidikan.

Perlu dipahami bahwa, sejalan dengan prinsip koherensi dalam pengembangan kurikulum LPTK dan keterkaitan dengan sekolah (*university-school based curriculum*), maka pengembangan kurikulumnya harus menunjukkan keterkaitan antara mata kuliah pedagogi umum dan khusus dengan praktek pembelajaran di sekolah. Mata kuliah Magang yang disebar dalam 3 atau 4 semester, dapat dipandang sebagai penajaman awal (*earlier exposure*) para calon guru pada situasi pembelajaran di kelas/sekolah. Tahapan yang dilaksanakan adalah (1) tahapan observasi terhadap praktek pembelajaran di kelas dan aspek-aspek yang terkait dengan pengelolaan dan implementasi kurikulum sekolah; (2) tahapan mengkaji aspek praktis kurikulum sekolah

dan penerapannya di kelas yang dikaitkan dengan perkuliahan kedua kelompok mata kuliah tersebut; (3) tahap penyusunan rancangan pembelajaran dan implementasinya berdasarkan keterkaitan antara yang diperoleh diperkuliahan dengan yang dipelajari di sekolah; dan (4) melaksanakan praktik pembelajaran di kelas (*internship* atau *practicum*).

Besaran SKS pada kurikulum LPTK disetiap program studi dengan berpedoman pada ketentuan KKNI, yaitu seluruh beban studi untuk program pendidikan S1 adalah antara 144 - 158 sks. Secara garis besar, struktur kurikulum S1 terdiri atas Kurikulum Inti (*core curriculum*) yang dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi utama lulusan (sekitar 85% dari keseluruhan sks yang harus diambil oleh mahasiswa) dan Kurikulum Pilihan (*elective curriculum*) yang dimaksudkan untuk memperkuat kompetensi utama/kompetensi penunjang (sekitar 15% dari keseluruhan sks yang harus diambil oleh mahasiswa). Kewenangan tambahan di luar mata kuliah utama dan mata kuliah pilihan sebanyak 24 sks.

Penutup

Rujukan utama pengembangan kurikulum pendidikan tinggi termasuk LPTK adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Integrasi nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum LPTK dilaksanakan melalui penerapan kurikulum antar dan inter disiplin yang dikenal dengan sebutan pendekatan transdisiplin. Penerapan pendekatan transdisiplin dalam kurikulum LPTK sebagai upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis guna membantu mahasiswa calon guru memahami konsep pengetahuan, pengalaman dan keterampilan secara terpadu dalam wujud memahami ajaran dan perintah agama, nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, budaya, dan adat istiadat.

Dalam kerangka menyiapkan guru yang mampu memenuhi tuntutan kekinian dan masa depan sesuai standar, pengembangan kurikulum di LPTK perlu memberlakukan: (1) kurikulum sesuai dengan tuntutan kekinian, (2) mengacu pada KKNI dan SNPT; (3) menyelenggarakan pendidikan profesional secara komprehensif; (4) isi kurikulum

dengan memuat dua komponen pokok, yaitu (i) komponen kurikulum untuk memberikan bekal kompetensi kependidikan dan (ii) komponen kurikulum untuk memberikan bekal kompetensi substansi materi yang akan diajarkan.

Daftar Pustaka

- Allan C. Ornstein dan Daniel U. Levina, *An Introduction to The Foundation of Education*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1985.
- Al Rasyidin, 2011, "Membangun Pendidikan Karakter: Sketsa Masalah dan Gagasan tentang Pendidikan Karakter", *Makalah Seminar Nasional Pendidikan Karakter dalam rangka Musyawarah Daerah ke XII Al-Jam'iyatul Washliyah Kabupaten Labuhan Batu pada tanggal 02 Februari 2011 di aula Asrama Haji Rantauprapat Bedjo*, "Pergeseran Pendidikan Moral di Sekolah". *Jurnal Kependidikan dan Kebudayaan Vidya Karya* Tahun XXII Nomor 2, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. *Higher Education Long-Term Strategy, 2003 - 2010*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Draf Final, *Panduan Penyusunan Kurikulum LPTK*
- James A Beane, *Curriculum Integration*, New York: Teachers College Press, 1997
- John Biggs and Catherine Tang. 2007. *Teaching for Quality Learning at University*. New York: University Press McGraw-Hill Education
- Joyce, B. Dan M. Weil. 1972. *Models of Teaching*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- Hujair AH, Sanaky, 2003. *Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani Indonesia*, Yogyakarta: Safiria Insania Press,
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002. *tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Kolb, D.A. 1984. *Experiential Learning: Experiences as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, N.J.: Prantice-Hall.
- Komaruddin Hidayat, "Generasi Tanpa Visi dan Komitmen", *Kompas* 28 Juni 2006

- Kosasih A. Djahiri, *Memahami Makna dan Isi Pesan Pembelajaran dan Portofolio Learning and Evaluation Based* (Bandung: PPs Universitas Pendidikan Indonesia, 2004)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007. tentang Standar Pendidik.* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 *tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).*
- Richard D. Van Scotter et.al, *Social Foundation of Education*, New Jersey: Printice Hall Inc., 1985
- Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility* (New York: Bantam Books, 1991)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Eka Jaya, 2003.
- UUD 1945: Amandemen I, II, III, IV (Jakarta: Sandro Jaya, t.t.).
- Sambutannya Presiden Susilo Bambang Yudoyono, pada Puncak Peringatan Hardiknas 2010, dalam jurnal *Kampus*.